

Heni Idris, Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011.....

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Di Kecamatan Bontang Selatan

Heni Idris

*Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisip Universitas Mulawarman*

Abstract: The purpose of this research is to describe the implementation of Mayor Bontang's policy number 39/2011. The result show that the program of society participation which is held at South Bontang faced by the number of problems in implementation level, both administratively or technically. But it can contribute significantly to development acceleration.

Keyword: Program, Fasilitation, Society administration

Abstrak: Tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan keputusan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011. Hasil Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program fasilitas partisipasi masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Bontang Selatan pada tataran implementasi ternyata dihadapkan pada sejumlah, baik yang bersifat administratif maupun teknis. Meskipun demikian, ternyata program tersebut mampu memberikan kontribusi yang berarti untuk percepatan pembangunan di daerah tersebut.

Kata Kunci: Program, Fasilitas, Administrasi Masyarakat

Pendahuluan

Dalam perspektif pembangunan nasional, pemerintah pusat telah memberikan legitimasi hukum kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan berharap dengan berlakunya kebijakan tersebut dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebab Melalui kebijakan tersebut daerah telah mendapatkan kewenangan yang lebih luas untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga memungkinkan kehidupan masyarakat di daerah lebih baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan percepatan dan pemerataan pembangunan, maka pemerintah Kota Bontang telah mengeluarkan kebijakan melalui keputusan Walikota Bontang Nomor 39 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan fasilitas partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan. Diharapkan dengan kebijakan tersebut, dapat membawa perubahan yang berarti di wilayah Kota Bontang, baik pembangunan dibidang infrastruktur pada skala

kecil, bidang ekonomi dalam skala kecil tetapi juga bidang sosial dalam skala kecil.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat di beberapa area atau wilayah Kecamatan Bontang Selatan yang belum tersentuh pembangunan bidang infrastruktur, bidang ekonomi dan bidang sosial. Kurang efektifnya pelaksanaan program pembangunan partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan disebabkan oleh beberapa persoalan, diantaranya: 1) kurangnya kesadaran masyarakat dalam peran serta mendukung pelaksanaan program, 2) ketidak selarasan antara rencana kerja dengan pencairan dana, 3) terbatasnya alokasi anggaran yang disediakan untuk masing-masing program kegiatan, 4) keragaman kompetensi diantara petugas pelaksana.

Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, terutama mengenai implementasi program fasilitasi di bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial kemasyarakatan di objek penelitian melalui partisipasi masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengungkap fenomena yang terjadi dan sekaligus dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mengenai implementasi program pembangunan fasilitas di Kecamatan Bontang Selatan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijaksanaan publik, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijaksanaan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijaksanaan, sebagaimana Meter dan Van Horn (1978) mendefinisikan *Policy implementation encompasses those by public and private individuals (and groups) that are directed decisions*. Definisi tersebut memberi makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Konsep implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Abdul Wahab, 1981) menyatakan bahwa memahami apa yang nyata terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diidentifikasi bahwa proses implementasi meliputi :

1. Disahkan Undang-Undang dan diikuti oleh *out put* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan oleh agen-agen yang mengimplementasikannya.

2. Ketaatan kelompok sasaran (*target group*) dengan kebijakan itu.
3. Pengaruh-pengaruh kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh agen pengambilan kebijakan.
4. Pengaruh-pengaruh kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh agen pengambilan kebijakan.
5. Perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau kebijakan tersebut

Dengan demikian proses kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan. Sehubungan dengan ini Anderson (1978) mengungkapkan 4 (empat) aspek penting dalam implementasi yaitu ;

- a. Siapa yang dilibatkan dalam Implementasi
- b. Hakekat proses administrasi
- c. Kepatuhan atas suatu kebijakan
- d. Efek atau dampak dari isi implementasi

Keempat aspek tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus, dan setiap kebijakan yang telah ditetapkan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana yang oleh Anderson disebut administrative unit, yaitu birokrasi publik mulai level atas sampai level birokrasi yang paling rendah. Sebagai konsekuensi logis dengan ditetapkan unit-unit organisasi/ birokrasi sampai pada level bawah, maka secara otomatis mereka akan mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan. Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan suatu keputusan kebijaksanaan (Biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan Pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden).

Van Meter dan Van Horn (dalam Lineberry 1975 dan A. Wahab 1997) merumuskan proses implementasi ini sebagai "*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.*" (Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pajabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasikan meliputi semua tindakan berlangsung antara pernyataan (*Formulasi*) kebijakan dan dampak aktualnya.

Berdasarkan beberapa pandangan yang telah diutarakan terdahulu bahwa proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyakut perilaku/ sikap badan-badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekutan politik, ekonomi dan sosial langsung atau pun tidak langsung akan mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover negative effects*).

Konsep Pembangunan

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, konsep pembangunan telah mengalami perkembangan yang begitu merujuk pada suatu paradigma. Dalam paradigma pembangunan sebuah negara ada yang berorientasi pada pertumbuhan (*Growth*), dan kesejahteraan (*Welfare state*), tetapi ada pula yang berorientasi pada neo ekonomi dan humanizing. Masing-masing paradigma tersebut memiliki perbedaan dan hal tersebut tergantung pada titik berat atau orientasinya.

Secara historis perkembangan pembangunan diwarnai oleh suatu evolusi yang menyatakan bahwa pembangunan mulai dari pemujaan terhadap pertumbuhan hingga paradigma baru dalam pembangunan terdapat pergeseran. Menurut Kuncoro (1997) paradigma baru pembangunan meliputi pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*), pembangunan mandiri (*self reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (*ecodevelopment*), dan pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (*ethnodevelopment*).

Pengertian pembangunan selama tiga dekade, lebih menekankan kemampuan ekonomi nasional dimana keadaan ekonomi mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang lama untuk menaikkan dan mempertahankan suatu kenaikan GNP (*Gross National Product*) antara lima sampai tujuh persen atau lebih per tahun. Namun demikian, pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pembangunan yang berorientasi pada kenaikan GNP saja tidak bisa memecahkan permasalahan pembangunan yang mendasar (Arsyad, 1999).

Menurut Rostow dalam Arsyad (1999) proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan dalam lima tahap yaitu masyarakat tradisional (*the traditions society*), prasyarat untuk tinggal landas (*the preconditions for take-off*), tinggal landas (*the take-off*) menuju kedewasaan (*the drive to maturity*), dan mass konsumsi tinggi (*the age of high mass-consumption*). Dasar perbedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi lima tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi.

Menurut Kuncoro (1997) teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan Rostow merupakan garda depan dari *linear stage of growth theory* yang banyak mempengaruhi pandangan dan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan, teori ini didasarkan pada pengalaman pembangunan di negara-negara maju terutama di Eropa.

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa pada dasarnya pembangunan mengandung unsur-unsur antara lain: 1) pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan; 2) merupakan suatu usaha yang dilaksanakan secara sadar dan terencana; 3) berorientasi pada perubahan dan pertumbuhan yang mengarah pada modernisasi; dan 4) bertujuan pada usaha pembinaan bangsa yang terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan dimana

terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas. (Riyadi dan Bratakusumah, 2004).

Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan mempunyai ciri terhadap pembangunan seperti dikemukakan oleh Todaro (1992) bahwa pembangunan suatu daerah harus mencakup 3 (tiga) nilai yaitu kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*), yang semuanya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar.

Pembangunan Infrastruktur

Dengan dibangunnya infrastruktur yang memadai, maka aksesibilitas dalam segala hal dapat lebih lancar. Pembangunan infrastruktur merupakan dinamika organisasi publik yang harus dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah. Seperti pembangunan di Kota Bontang sebagai daerah yang baru dimekarkan, maka sudah barang tentu diperlukan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur penting, tidak hanya menyangkut kepentingan kegiatan sosial, transportasi, ekonomi, politik dan keamanan, tetapi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sangat diperlukan.

Dalam rangka percepatan di daerah maka terutama pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat, perlu dibangunnya infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan keluarga tidak lagi dihadapkan pada pengorbanan yang tinggi, baik waktu, tenaga dan biaya. Disisi lain potensi daerah yang kaya bahan tambang dan hasil hutan jangan sampai tidak memiliki nilai ekonomi, lantaran rendahnya aksesibilitas jalur transportasi yang tersedia seharusnya mampu mewujudkan harapan tersebut. Namun kesemuanya itu akan tergantung pada komitmen yang kuat Walikota Bontang, DPRD dan para Camat serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di daerahnya.

Kebijakan Pelaksanaan Fasilitas Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka percepatan pembangunan maka yang dilakukan pemerintah Kota Bontang adalah mengeluarkan berbagai kebijakan, dan salah satunya melalui Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di Kelurahan dalam bidang infrastruktur, bidang peningkatan ekonomi masyarakat, bidang

pembangunan sosial kemasyarakatan. Kebijakan tersebut merupakan tindakan yang konstruktif, mengingat masih banyaknya infrastruktur di pemerintahan kelurahan yang kurang menunjang kelancaran kegiatan dibidang transportasi, ekonomi dan sosial. Kebijakan tersebut merupakan salah satu dari 6 (enam) Program Unggulan Pemerintah Kota Bontang yaitu Bantuan Rp.50 Juta per RT, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi. Perlunya dilakukan program fasilitasi partisipasi masyarakat di bidang/ infrastruktur di wilayah kecamatan Bontang Selatan.

Seiring dengan kebijakan tersebut, maka pemerintah telah menetapkan kelompok sasaran dan besarnya dana yang diperlukan untuk menunjang program fasilitas partisipasi masyarakat. Sebagai sasaran yang ditetapkan dalam program fasilitas partisipasi masyarakat, sebagaimana yang diatur pada pasal 3 sebagai berikut :

1. Sasaran pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat adalah semua RT di 15 (lima belas) Kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yaitu sebanyak 489 RT.
2. Alokasi Anggaran setiap RT sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
3. Alokasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dilaksanakan oleh SKPD Kelurahan.

Terkait dengan pelaksanaan program fasilitasi partisipasi masyarakat diperlukan peran serta masyarakat Rukun Tetangga, disamping itu pula lebih mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Transparansi, seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah Rukun Tetangga (RT),
2. Partisipatif, seluruh anggota masyarakat dilingkungan wilayah Rukun Tetangga (RT) berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga (musyawarah) sebagai pengambilan keputusan tertinggi,
3. Akuntabilitas, seluruh pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum,
4. Berkelanjutan, manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkelanjutan.

Hasil Penelitian

Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa dalam rangka percepatan pembangunan maka pemerintah Kota Bontang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan fasilitasi partisipasi masyarakat. Kebijakan diharapkan akan meningkatkan pembangunan di wilayah Kota Bontang. Terutama pembangunan bidang infrastruktur, bidang ekonomi dan bidang sosial kemasyarakatan. Meskipun pemerintah Kota Bontang telah mengeluarkan kebijakan tersebut, tetapi dalam perkembangannya mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Seperti halnya yang terdapat di Kecamatan Bontang Selatan, belum semua program pembangunan yang dikemas dalam kebijakan tersebut

dapat direalisasikan dan hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan program tersebut, maka sesuai hasil pengolahan data dan berdasarkan fokus penelitian yang ditetapkan, secara substantif dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Sosialisasi Pelaksanaan Fasilitas Partisipasi Masyarakat

Sesuai hasil observasi di objek penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai kebijakan walikota Bontang telah dilaksanakan, baik yang dilakukan kepada tim pelaksana (aparatur kelurahan dan ketua RT) maupun tim pendamping (petugas Kecamatan). Dari hasil observasi menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang efektif. Hal tersebut didukung oleh pendapat beberapa informan dan key informan menyatakan bahwa dalam hal sosialisasi program pembangunan fasilitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan kurang efektif. Artinya masih banyak masyarakat yang belum mengerti secara mendetail mengenai kebijakan Walikota Bontang terkait dengan program pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial kemasyarakatan dalam skala kecil.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat maka sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui pertemuan-pertemuan formal, yang dilakukan di Kantor Camat dan Balai pertemuan di kelurahan tetapi juga dilakukan melalui media cetak, televisi dan radio dan hasilnya kurang memadai karena kegiatan fasilitas Partisipasi Masyarakat merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di Kota Bontang.

Mekanisme Kegiatan Pembangunan Fasilitas Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan mekanisme kerja yang dibuat telah tersusun dengan baik sehingga masing-masing unsur pelaksana dapat mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga distorsi kegiatan dapat dihindarkan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pelaksanaan program fasilitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan, dapat dikemukakan oleh beberapa nara sumber yang terangkum dalam uraian seperti ini ” ... mengenai mekanisme yang terkait dengan pelaksanaan program fasilitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan, secara normatif tersusun dengan baik, tetapi secara aplikatif masih dihadapkan pada suatu permasalahan. Mekanisme yang dibangun ternyata dalam pelaksanaannya kurang tersosialisasi dengan baik. Ini berarti secara aplikatif mekanisme terhadap pelaksanaan program fasilitas partisipasi masyarakat belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh jalur birokrasi yang panjang, sehingga mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja (schedule) dan akhirnya pelaksanaan pembangunan fasilitas yang berbasis partisipasi masyarakat kurang efektif. Kemudian dari hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program fasilitas partisipasi

masyarakat belum selaras dengan mekanisme yang ditentukan. Karena kurangnya pengetahuan dan keterbatasan SDM.

Pembangunan Fasilitas Bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan Bontang Selatan akan sangat berpengaruh kepada roda perekonomian masyarakat. Keberadaan fasilitas jalan dan jembatan yang memadai akan mendukung tingkat mobilitas masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Jalan dan jembatan merupakan prasarana yang sangat penting bagi penunjang sarana angkutan darat, karena di Kecamatan Bontang Selatan transportasi darat merupakan jalur arteri bagi transportasi lokal.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa mengenai pembangunan jalan baru yang dilakukan di lima kelurahan yaitu Kelurahan Bontang Lestari, Berbas Tengah, Berbas Pantai, Satimpo, Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah telah terealisasi dengan baik. Realisasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana transportasi di wilayah Kecamatan Bontang Selatan telah dibangun jalan baru, Perbaikan jembatan di Kelurahan Berbas Tengah pada tahun 2012, sedangkan untuk peningkatan mutu jembatan di Kelurahan Satimpo sudah terealisasi pada tahun 2011.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitasi bidang sosial kemasyarakatan yang dilakukan di Kecamatan Bontang Selatan cukup baik. Program-program yang dibuat melalui rencana kerja ternyata sudah dilaksanakan, hanya saja hasil yang dicapai kurang optimal. Hal tersebut disebabkan, selain kecilnya alokasi anggaran yang ditentukan, juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program tersebut. Misalnya dukungan dalam memberikan santunan natura (bantuan makanan) kepada penduduk miskin, lanjut usia dalam skala kecil, ternyata belum semua orang yang mampu bersedia memberikan santunan kepada masyarakat miskin. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada kegiatan lain melalui bulan bakti gotong royong masyarakat ternyata hanya diikuti oleh sebagian besar masyarakat yang status ekonominya pas-pasan, sedangkan warga masyarakat yang berkecukupan justru kurang peduli terhadap kegiatan dimaksud. Meski demikian secara aplikatif program fasilitasi bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontang Selatan cukup efektif.

Kemampuan Tim Pelaksana dalam Melaksanakan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Meskipun belum semua anggota tim pelaksana memiliki kemampuan sesuai yang dibutuhkan tetapi diantara anggota tim ada yang memiliki kemampuan dan pengalaman sesuai dengan aktivitas tersebut, maka dengan koordinasi dan kerjasama yang baik, justru pelaksanaan program pembangunan fasilitas partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan.

Meskipun dari segi kompetensi anggota tim terdapat perbedaan kemampuan, karena masing-masing memiliki semangat dan ethos kerja, maka pelaksanaan program pembangunan fasilitas partisipasi masyarakat wilayah kecamatan Bontang Selatan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keberhasilan tim pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fasilitas, tidak terlepas dari tim pendamping, sebab dengan adanya tim pendamping dapat mengarahkan jalannya kegiatan, baik kegiatan bidang infrastruktur, bidang ekonomi maupun bidang sosial kemasyarakatan.

Dari hasil temuan diobjek penelitian menunjukkan bahwa kehadiran tim pendamping sangat membantu dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh tim pelaksana, karena itu cukup beralasan jika kehadiran tim pendamping sangat diperlukan. Hal tersebut didukung dengan oleh Lurah Berbas tengah mengatakan bahwa adanya tim pendamping memang sangat diperlukan karena memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk mendukung program, bukan hanya kemampuan dibidang administrasi tetapi juga dibidang teknis, sehingga kehadiran tim pendamping sangat diperlukan untuk mengarahkan agar proses kegiatan pembangunan fasilitas dapat terlaksana sesuai sasaran.

Koordinasi dan kerjasama antar Tim Pelaksana

Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kerjasama antar petugas pelaksana seiring dengan pelaksanaan program fasilitasi partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan cukup baik.

Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan.

Faktor-faktor yang Mendukung Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan antara lain Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerinthan Daerah, Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, Kuatnya komitmen perangkat kecamatan dan kelurahan terhadap pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan dalam upaya percepatan pembangunan fasilitas pada bidang infrastruktur, bidang ekonomi, dan bidang sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontang .

Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Fasilitasi Partisipasi Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program fasilitasi partisipasi masyarakat di wilayah Kecamatan Bontang Selatan. Belum terdapat sinkronisasi antara rencana kerja / schedule kegitan dengan pencairan dana yang dikeluarkan oleh Badan pemberdayaan masyarakat Kota Bontang, Kurang efektifnya dalam melakukan sosialisasi kepada lapisan

masyarakat di wilayah Kecamatan Bontang Selatan, dan terbatasnya tenaga pelaksana yang profesional dalam menunjang kegiatan yang ditetapkan melalui program fasilitasi partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan, sehingga dalam proses kegiatan yang dilakukan, baik melalui bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial menghadapi kendala.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi program fasilitasi partisipasi masyarakat yang digelar di Kecamatan Bontang Selatan yang dilakukan kurang optimal, berakibat terhadap kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan, baik dalam bentuk material maupun non materiil.
2. Mekanisme pelaksanaan program fasilitasi partisipasi masyarakat di Kecamatan secara aplikatif terkait dengan pedoman pelaksanaan fasilitasi partisipasi masyarakat belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh jalur birokrasi yang panjang, sehingga mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja (schedule) dan akhirnya pelaksanaan program fasilitasi yang berbasis partisipasi masyarakat kurang efektif.
3. Realisasi pembangunan infrastruktur yang belum terealisasi sampai dengan tahun 2013 pada umumnya karena kendala keterbatasan dana sehingga disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan.
4. Realisasi pembangunan fasilitasi bidang ekonomi diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah Kota Bontang.
5. Fasilitasi bidang sosial kemasyarakatan di Kecamatan Bontang Selatan cukup efektif, meskipun belum mendapat apresiasi masyarakat. Belum ada kemauan warga dalam melibatkan diri. Ikut serta mendukung pembangunan fasilitas sosial kemasyarakatan.
6. Dari aspek kerjasama dan koordinasi antar anggota tim pelaksana program fasilitasi partisipasi masyarakat terindikasi cukup baik, dan hal tersebut dapat diketahui dari tindakan yang dilakukan mulai dari penyusunan rencana kerja, rencana sosialisasi program, penentuan pelaksanaan program hingga pada pertanggungjawaban ketua tim pelaksana terhadap pelaksanaan program.

Saran-saran

Dari hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pembangunan fasilitas partisipasi masyarakat di Kecamatan Bontang Selatan, maka perlunya meningkatkan/ mengefektifkan sosialisasi program keseluruhan elemen

masyarakat. Dengan demikian informasi yang diterima masyarakat dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan sumbangan yang berarti, baik yang bersifat material maupun non materiil, sehingga rencana kerja yang ditetapkan melalui program pembangunan fasilitas dapat direalisasikan.

2. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pembangunan fasilitas di bidang infrastruktur, bidang ekonomi, dan bidang sosial kemasyarakatan perlu penambahan anggaran, sehingga seluruh instrumen kegiatan yang ditetapkan dalam program dapat dilaksanakan sesuai target. Sebab alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sebanding dengan jumlah kegiatan yang ditetapkan, sehingga tidak mengherankan jika tidak semua jenis kegiatan dapat dilaksanakan.
3. Perlunya meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pelaksana program, baik dari perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, maupun dengan lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan program, agar memiliki keselaran dan sinkronisasi dalam mengatasi persoalan yang terkait dengan pencairan dana yang selama ini masih terjadi kesenjangan berujung pada realisasi kegiatan yang kurang efektif.
4. Perlunya menumbuhkan kesadaran dan partisipasi warga untuk mendukung dan membantu terlaksananya program pembangunan fasilitas di Kecamatan Bontang Selatan, sehingga percepatan pembangunan masyarakat, baik yang berkenaan dengan bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial kemasyarakatan dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin, 1994 *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi aksara. Jakarta.
- _____, 1997 “ Kebijakan Pembangunan Pedesaan Di Negara-Negara Berkembang, Skala Permasalahan dan Hakekatnya”. Dalam *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. IKIP Malang.
- _____, 1999. *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Bumi aksara, Jakarta.
- _____, 1997. *Analisis Kebijaksanaan Publik*, Teori dan Aplikasinya. Cetakan II. Danar Wijaya. Brawijaya University Press. Malang.
- Anderson, J.E. 1978. *Public Policy Making* Holt. Rinehart and Winston. New York.
- Arsyad L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Bratakusumah, Supriady, Dedy dan solihin, Dadang. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kuncoro. 1997. *Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan Wilayah : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta
- Lineberry, Robert H. 1978. *American Public policy*. North Western Univesity Harper And Row. Publiser, New York
- Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier (eds), 1981. *Effectivly Policy Implementation*. Lexington Mass.
- Meter, Donald, S. Van dan Carl E Van Horn, 1978, *The Policy Implementation Process; Aconceptual Frame Work*, Baverly Hills, Sage Publication inc
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumas, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.